

SIARAN RADIO PENDIDIKAN: UPAYA PERLUASAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

Educational Radio Broadcast: Efforts for Expanding Educational Services in the Borderline Region of Indonesia

INNAYAH

Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRPK)
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekom-Kemendikbud)
Jl. Sorowajan Baru No. 367 Banguntapan Yogyakarta, Indonesia
(innamtj@gmail.com)

ABSTRAK: Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di perbatasan, Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan. Hasil kajian/ telaah mengungkapkan bahwa (1) pemerintah telah melakukan perluasan akses layanan pendidikan di wilayah perbatasan yang antara lain berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar, (2) LPP RRI, dan KPID telah menyelenggarakan siaran di wilayah perbatasan di 12 provinsi, dan (3) model siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan dilakukan dalam bentuk kerjasama kemitraan antara Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta (BPMRPK-Kemendikbud) dengan stasiun radio, baik Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Publik Swasta (LPS) maupun Radio Komunitas (Rakom).

Kata kunci: Model, siaran, radio pendidikan, wilayah perbatasan.

ABSTRACT: The aim of this study is to (1) describe the government's policy on access to education on the border areas, (2) describe the condition of radio station in the border areas, and (3) explain the educational broadcasting model in the border areas. The method used is a documentary study towards the condition of educational services, RRI as a Public Broadcasting Institution (LPP), and the Local Indonesian Broadcasting Commission (KPID) in the border areas. The results of the study are: (1) the government has widened the educational access in the border areas through among others the construction of school infrastructure and dormitories, and the assignment of

teachers to teach in the border areas, (2) LPP RRI and KPID in border areas have been broadcasting via radio stations in 12 provinces, and (3) the model of educational broadcast used in the border areas is the form of partnership between BPMRPK Yogyakarta, Ministry of Education and Culture with the radio stations in the border areas such as Public Broadcasting Institution (LPP), Local Public Broadcasting Institution (LPPL), Private Broadcasting Institution (LPS) as well as the Community Radio (Rakom).

Keywords: *Model, broadcasting, education radio, border area.*

PENDAHULUAN

Kondisi perbatasan Indonesia dengan berbagai negara tetangga hingga kini masih mengalami keterlambatan/ketertinggalan di bidang pembangunan, baik mengenai ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Lebih memprihatinkan lagi bahwa pendidikan yang merupakan faktor utama peningkatan kemajuan bangsa masih kurang dirasakan pemerataannya.

Kondisi perbatasan yang telah dikemukakan adalah sejalan dengan hasil penelitian Yeheskel yang mengungkapkan bahwa (1) kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintah untuk daerah perbatasan belum sepenuhnya terlaksana (misalnya di Kecamatan Tulin Onsoi-Kabupaten Nunukan), baik pembangunan fisik (infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi) maupun pembangunan non-fisik (sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, pelestarian budaya), dan (2) hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan, seperti yang terjadi di kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan, yang berkaitan dengan kondisi alam dan Sumber Daya Manusia (SDM) (Yeheskel, 2014).

Potret pendidikan di wilayah perbatasan seperti dikutip Ester Lince Napitupulu yang merujuk pada informasi yang disampaikan oleh Winsulangi Salindeho, Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, yang berbatasan dengan Filipina, mengemukakan bahwa pendidikan dasar yang menjadi kewajiban negara belum sepenuhnya terpenuhi atau

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Beberapa pulau hanya mempunyai satuan pendidikan SD sehingga belum semua anak usia wajib belajar 12 tahun dapat melanjutkan pendidikannya ke SMP di samping jumlah gurunya juga yang masih terbatas (Napitupulu, 2011).

Contoh lainnya tentang kondisi keterbatasan layanan pendidikan di daerah perbatasan juga dirasakan oleh anak-anak usia sekolah di Distrik Sota, Merauke, Papua. Di daerah yang berbatasan dengan Papua Niugini ini, listrik sering padam dan tak ada sinyal telepon seluler. Para siswa SMPN-11 Distrik Sota tidak mempunyai ruang laboratorium.

Penggunaan komputer juga masih langka karena hanya ada dua komputer yang masih berfungsi. Kedua perangkat komputer yang ada ini juga sulit dioperasikan karena sumber tenaga listrik yang tidak memadai. Kondisi yang terjadi di SMPN-11 Distrik Sota juga dialami oleh SMKN-1 Sota dan SMPN Satap Wasur. Mengingat banyak para siswa SMKN-1 Sota ini berasal dari daerah yang jauh maka mereka tinggal di rumah guru atau asrama. Para siswa yang mengikuti pendidikan di SMKN-1 Sota termasuk yang tinggal di asrama tidak dipungut biaya (gratis) tetapi biayanya ditanggung pemerintah melalui dana bantuan BOS (Biaya Operasional Sekolah) sekalipun kondisi yang tersedia memang serba terbatas.

Meskipun kondisi sekolah serba terbatas, namun layanan pendidikan yang tersedia di Distrik Sota ternyata diminati oleh warga negara Papua Niugini yang tinggal di daerah perbatasan dengan Indonesia. Mereka

menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah di Sota karena kondisinya dinilai masih lebih baik dibandingkan dengan sekolah Papua Nugini yang ada di wilayah perbatasan dengan Indonesia.

Kondisi pendidikan di perbatasan Indonesia-Malaysia tampak sangat timpang. Sekolah-sekolah Malaysia yang berada di wilayah perbatasan dengan Indonesia dibangun dengan baik dan di antaranya ada yang dilengkapi dengan asrama. Di samping itu, para guru yang ditugaskan mengajar ke sekolah-sekolah perbatasan adalah yang masih muda yang cakap mengajar. Pada penghujung tahun 2010, pertemuan guru-guru se-Indonesia yang bertugas di wilayah perbatasan, terungkap bahwa ada seorang guru di Desa Suruh Tembawang, Kabupaten Entikong, Kalimantan Barat (Kalbar) yang mengajar 111 siswa SD.

Sebagai informasi singkat bahwa Desa Suruh Tembawang berpenduduk 2.795 orang, yang terdiri atas 963 orang buta huruf, 689 orang tidak tamat SD, 917 orang tamat SD, 113 orang tamat SLTP, 102 orang tamat SLTA, 10 orang berijazah diploma, dan seorang berijazah sarjana. Bahkan SMPN-2 Suruh Tembawang mengajarkan teori teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kepada 73 siswa sekalipun para siswa tidak pernah melihat komputer. Aliran listrik pun belum dinikmati warga. SMPN-2 ini hanya mempunyai satu peta Kalimantan Barat dan sebuah bola dunia (Napitupulu, 2011).

Berkaitan dengan kondisi pendidikan di wilayah perbatasan sebagaimana yang telah diuraikan, hasil penelitian Sandy Nur Ikfal Raharjo mengungkapkan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia haruslah berpotensi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang antara lain di bidang infrastruktur yang kurang, sektor perdagangan yang sangat tergantung pada Malaysia, tingkat pendidikan yang masih relatif rendah, ancaman terhadap nasionalisme, dan koordinasi antarlembaga yang lemah (Raharjo, 2013).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Harmen Batubara mengemukakan bahwa permasalahan pendidikan di wilayah perbatasan adalah kurangnya tenaga

pendidik, rendahnya kesejahteraan guru, minimnya kualitas sarana fisik, kurangnya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan, dan budaya tentang pentingnya pendidikan yang masih rendah (Batubara, 2015).

Pernyataan Harmen Batubara didukung berbagai hasil riset, di antaranya adalah yang dilakukan Balai Penelitian dan Pengembangan (BPP) Provinsi Kalimantan Timur yang mengemukakan (1) kurang dari 60% guru di daerah perbatasan yang memiliki kualifikasi mengajar yang sesuai, (2) sekitar 80% jenjang karier guru di perbatasan belum baik, (3) program sertifikasi guru belum menjangkau sekitar 10% guru, (4) lebih dari 40% guru mengajar dengan lebih daripada 2 mata pelajaran (menunjukkan kurangnya tenaga pengajar atau distribusi tenaga pengajar yang kurang merata), (5) sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran di sekolah masih rendah, dan (6) monitoring terhadap kinerja guru yang juga masih rendah.

Di samping beberapa hal yang masih memprihatinkan, maka hal-hal positif tentang kondisi pendidikan di wilayah perbatasan antara lain adalah (1) motivasi anak mengikuti pelajaran cukup tinggi, (2) perhatian orang tua yang cukup tinggi terhadap pendidikan anak, dan (3) APM dan APK di Kabupaten Nunukan dan Kutai Barat cukup tinggi sehingga program wajib belajar hampir tuntas. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan sarana yang memadai untuk penuntasan program wajib belajar ini (Asri, 2018).

Penelitian relevan lainnya adalah yang dilakukan oleh Hery Kurniawan Putra, Wanto Rivaie, dan Fatmawati yang bertujuan menganalisis adaptasi pembinaan yang dilakukan Pengawas UPT Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kompetensi sosial guru SD di wilayah perbatasan di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kompetensi sosial guru, pengawas memberikan berbagai saran, himbauan, dan peringatan.

Adanya beberapa hambatan di wilayah perbatasan, seperti akses jalan yang rusak, jaringan komunikasi seluler yang sulit,

perbedaan karakter individu guru, dan perbedaan kultur masyarakat yang menuntut pengawas dan guru untuk melakukan adaptasi (Putra, Rivaie, Fatmawati, 2014).

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan Witarsa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang mengungkapkan bahwa total efek kinerja kepemimpinan pendidikan berbasis nilai berpengaruh terhadap pengembangan budaya sekolah di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (Witarsa, 2011).

Penelitian lain yang juga masih relevan adalah yang dilaksanakan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan di wilayah perbatasan pada tahun 2012 dan 2013. Cakupan wilayah yang diteliti adalah daerah perbatasan antara (1) NTT dengan Timor Leste dan Australia; (2) Papua dengan Papua Niugini; (3) Sulawesi Utara dengan Filipina; (4) Kaltim dengan Malaysia; (5) Riau dengan Malaysia; (6) Kepri dengan Singapura; dan (7) Kalbar dengan Malaysia) pada tahun 2012 dan 2013.

Temuan pokok penelitian mengungkapkan bahwa (1) penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah rata-rata masih kekurangan tenaga guru, (2) penyelenggaraan pendidikan di Madrasah rata-rata kekurangan, baik sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik dan kependidikan, dan (3) penyelenggaraan pendidikan keagamaan, khususnya Islam rata-rata kekurangan lembaga dan tenaga pendidik (Kemenag, 2015).

Berdasarkan berbagai informasi dan hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi fokus kajian adalah mengenai: (1) kebijakan pemerintah terhadap akses layanan pendidikan di daerah perbatasan, (2) keberadaan radio siaran di wilayah perbatasan, dan (3) model siaran pendidikan yang sesuai di wilayah perbatasan.

Tujuan dari kajian/telaah ini adalah untuk (1) mendeskripsikan kebijakan pemerintah di bidang perluasan akses terhadap layanan pendidikan di perbatasan, (2) menggambarkan keberadaan atau kondisi stasiun radio di wilayah perbatasan, dan (3) menjelaskan model siaran pendidikan di wilayah perbatasan.

METODA

Metoda yang digunakan di dalam kajian ini adalah studi dokumentasi terhadap kondisi layanan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan peranserta Radio Republik Indonesia (RRI) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di wilayah perbatasan di bidang layanan pendidikan. Di samping itu, kajian ini juga diperkaya dengan (1) berbagai pengalaman empirik (*best practices*) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pustekkom di bidang penyelenggaraan dan pemanfaatan siaran radio pendidikan, baik untuk peserta didik maupun untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, dan (2) pengalaman peranserta penulis dalam penyelenggaraan siaran radio pendidikan.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemikiran yang bermanfaat bagi upaya perluasan akses layanan pendidikan melalui siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan di bidang pembangunan pendidikan, terutama pendidikan di wilayah perbatasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan perbatasan negara menurut UU Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga (Manurung, 2011). Wilayah perbatasan tersebut sampai saat ini tampaknya masih belum mendapatkan perhatian secara menyeluruh oleh pemerintah, sekalipun memang berbagai upaya telah dilakukan untuk kemajuan wilayah perbatasan termasuk di bidang pendidikan. Bidang pembangunan pendidikan ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia

yang lebih berkualitas dan hak mendapatkan pendidikan sebagaimana yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014, Mohammad Nuh, dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2014 menyampaikan bahwa “permasalahan mendasar dalam pendidikan di Indonesia masih berupa akses pendidikan yang belum merata” (Ginancar, 2014). Permasalahan pendidikan tersebut belum sepenuhnya dapat diselesaikan sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

Lebih jauh diamanatkan oleh UU Nomor 20 tahun 2003 bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar terbentuk manusia Indonesia seutuhnya, tertanam pada setiap diri manusia Indonesia insan yang paripurna jasmani dan rohani (Ristekdikti, 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Yahya Zein mengemukakan bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk menjamin pemenuhan hak warga negara akan pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi dan Undang-Undang yang mengikutinya (UII, 2015).

Dilihat dari aspek kelembagaan dan *capacity building*, serta diperkuat dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka pengelolaan kawasan perbatasan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UII, 2015). Dalam kaitan ini, berbagai kebijakan pemerintah untuk memajukan pendidikan di wilayah perbatasan telah dilakukan yang mencakup pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan,

baik yang berupa pembangunan sarana-prasarana sekolah, fasilitas sekolah, dan asrama maupun ketersediaan guru masih belum merata dinikmati oleh peserta didik di wilayah perbatasan.

Berkaitan dengan masalah pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan, Mendikbud Anies Baswedan telah memulai program (1) Guru Garis Depan (GGD) guna mengatasi masalah kekurangan guru, khususnya di sejumlah wilayah terpencil, (2) Sarjana Mengajar di Daerah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (SM3T), dan (3) Indonesia Mengajar (Kompas, 2016).

Berbagai upaya pemerintah untuk merealisasikan kebijakan terhadap pemecahan masalah perluasan akses layanan pendidikan yang selama ini dilakukan tampaknya masih belum merata menjangkau daerah-daerah perbatasan. Diperlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang besar di samping terus dikaji berbagai alternatif lainnya. Salah satunya adalah dengan melakukan siaran pendidikan melalui kerjasama yang dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK Kemdikbud) Yogyakarta dengan stasiun-stasiun radio yang ada di wilayah perbatasan.

Berdasarkan dokumen yang ada dapatlah dikemukakan bahwa Pustekkom telah berpengalaman menyelenggarakan siaran radio untuk kepentingan pendidikan. Beberapa di antara pengalaman Pustekkom adalah penyelenggaraan (1) pendidikan dan pelatihan guru dan calon guru SD melalui siaran radio (atau yang disebut sebagai: Diklat SRP Guru SD), (2) pendidikan Diploma-II guru SD melalui Siaran Pendidikan (D-II SP), dan (3) pendidikan dan pelatihan jarak jauh bahasa Inggris Guru SD (DJJ Bahasa Inggris Guru SD). Program diklat DJJ Bahasa Inggris ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa (P3G Bahasa) yang bertujuan untuk (1) mempersiapkan guru SD mengajarkan pelajaran bahasa Inggris dan sekaligus juga untuk (2) meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Inggris di Sekolah Dasar (Siahaan, 2006).

Peranan siaran radio ini dinilai sangat penting dan dibutuhkan karena kepemilikan perangkat pemanfaatannya sudah memasyarakat. Hasil survei Nielsen menunjukkan bahwa sebanyak 20% penduduk berumur 5 tahun ke atas di 10 kota-kota besar di Indonesia mendengarkan siaran radio. Setelah ditinjau lebih jauh, ternyata masyarakat di luar Jawa yang lebih banyak mendengarkan siaran radio (37%) dibandingkan dengan masyarakat di pulau Jawa (18%). Rata-rata masyarakat di luar Jawa mendengarkan siaran radio melalui pesawat radio. Berbeda halnya dengan masyarakat di dalam Jawa di mana mereka lebih banyak mendengarkan radio melalui telepon genggam. Lebih jauh dikemukakan bahwa masyarakat di luar Jawa lebih banyak mendengarkan siaran radio pada sore hari; sementara masyarakat di pulau Jawa cenderung mendengarkan siaran radio pada pagi hari (Nielsen, 2014).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai corong pemerintah dalam penyebarluasan informasi, layanan pendidikan, dan penyajian hiburan telah berperanserta dalam siarannya di wilayah perbatasan. Agus Sukoyo dalam penelitiannya menunjukkan bahwa peran stasiun RRI di wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi dan hiburan tetapi juga sebagai lembaga yang menyuarakan suara atau aspirasi masyarakat perbatasan yang sekaligus sebagai kontrol sosial (Sukoyo, 2014). Lebih jauh, hasil penelitian Agus Sukoyo mengungkapkan bahwa masalah utama pendidikan yang diinformasikan dari wilayah perbatasan adalah mengenai fasilitas pendidikan yang masih kurang, seperti di: Batam, Entikong, Nunukan, dan Atambua.

Masih berkaitan dengan siaran radio di wilayah perbatasan, Hadiyat mengemukakan bahwa stasiun RRI Kupang sebagai lembaga penyiaran publik telah menjalankan perannya sebagai media perbatasan yang dibuktikan dengan siarannya yang terkait dengan perbatasan (Hadiyat, 2016). Permasalahan yang dihadapi adalah yang bersifat kelembagaan yang mengakibatkan sempitnya ruang gerak RRI dalam berkreaitivitas, baik di bidang program maupun peningkatan sumber daya manusia.

Berbagai upaya lain di wilayah perbatasan yang telah dilakukan RRI sebagai lembaga penyiaran publik adalah menggagas program Komunitas Keluarga Cinta Siaran Indonesia. Siaran ini dimaksudkan untuk menyaring siaran radio dan televisi luar negeri di wilayah perbatasan Indonesia. Program ini diharapkan mampu mengembalikan rasa nasionalisme masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan dengan cara memupuk rasa cinta tanah air melalui siaran lokal. Badan tersebut sudah hadir di 5 daerah di Riau, yang merupakan kawasan terluar wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Sejak tahun 2009, LPP telah merintis pendirian stasiun RRI di sejumlah wilayah perbatasan. Memasuki tahun 2011, jumlah stasiun RRI di daerah perbatasan dan terpencil telah mencapai 16 stasiun radio (Darmanto, 2012). Sehubungan dengan siaran radio di wilayah perbatasan, Niken Widiastuti, Direktur Utama LPP RRI, menyampaikan bahwa pengembangan program siaran radio di perbatasan perlu ditangani secara khusus dan serius. Pertimbangannya adalah bahwa fungsi siaran produksi studio RRI di perbatasan merupakan alat pertahanan negara di bidang informasi, mengindonesiakan masyarakat Indonesia di perbatasan dengan mengajak mereka berbahasa Indonesia, membuka isolasi informasi, memberikan ruang bagi anak-anak mengembangkan bakat, memberikan pendidikan bagi masyarakat perbatasan yang putus sekolah.

Fungsi lainnya dari siaran radio yang diproduksi studio RRI di wilayah perbatasan adalah melakukan advokasi hukum dan budaya, menyelenggarakan siaran hiburan dan tali kasih antarkeluarga yang tinggal di negara tetangga dan Indonesia, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan sebagai alat diplomasi dengan negara tetangga (Darmanto, 2012).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tampaknya betapa pentingnya keberadaan siaran radio di wilayah perbatasan. Kepedulian pemerintah melalui siaran radio di bawah naungan LPP RRI dan KPID perlu dukungan konten siaran guna

memperkuat keberadaan dan keberlangsungan siaran radio di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, peranserta LPP RRI dan KPID di daerah perbatasan adalah sangat strategis. KPID yang berada di provinsi Kalbar, Kaltim, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Kepri, Maluku, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara (KPI, 2012).

Tabel 1 berikut ini menyajikan data tentang keberadaan stasiun radio di wilayah perbatasan Indonesia.

PROVINSI	STASIUN RADIO DI WILAYAH PERBATASAN
Kepulauan Riau	1 Radio publik dan 1 Radio swasta.
Kalimantan Barat	Radio Kimtas (Bantuan Depkominfo di Kabupaten Bengkayang), Radio Komunitas (Swadaya) di seluruh kab. di Kalimantan Barat, Radio LPPL (Sangau, Kapuas, Hulu), 2 LPP RRI dan 1 Radio Persiapan (Entikong, Sambas, Sintang, dan Pontianak)
Kalimantan Timur	Radio Suara Kubar, Radio Suara Katulistiwa, Radio Sendawar, Radio Fantastik, RRI (Kab. Kubar), Radio Enggang Perkasa, Anur Swara Radio, RRI (Kab. Malinau).
NTT	8 Rakom (Kab. Belu), 2 Rakom Kab. Timor Timur Utara (Kec. Eban & Nunpene), 2 Radio Komunitas (Alor).
Maluku Barat daya	1 Radio LPS
Maluku Utara	Radio Gelamor milik AURI.
Aceh	LPPL Suara Sabang, LPPL Suara Cempaka Kuneng (Aceh Timur), LPS Radio Gipsi Pratita (Langsa), LPS Radio Birama Indah (Aceh Tamiang).
Papua	RRI Bovel Digoel, RRI Skou/Wutung, RRI Oksibil,) dan 1 LPK di Keerom.
Papua Barat	Radio Komunitas (Waisai Kab. Raja Ampat).
Riau	8 Radio (Rakor Hilir), 13 Radio (Dumai), 10 Radio (Bengkalis), 3 Radio (Kep. Meranti).
Sulawesi Utara	Radio LPK KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dan Suara Kasih (Kab. Sangihe).

Sumatera Utara 7 Radio (Labuhan Batu), 6 Radio & 1 LPK (Asahan), 3 Radio (Tanjung Balai), 4 Radio & 1 LPK (Langkat).

Sumber: Buku Penyiaran Perbatasan Tahun 2012.

Keadaan yang sama juga dialami di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia di mana siaran dari 18 stasiun radio Malaysia dapat didengar dengan jelas di 5 kabupaten perbatasan Indonesia. Kondisi nyata atau faktual di wilayah perbatasan tersebut sudah seharusnya mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah pusat dan lembaga-lembaga pemerintah di daerah terutama LPP dan KPI. Dikemukakan demikian karena KPI telah mendapat amanat sebagai lembaga yang berwenang menetapkan standar program, melakukan pengawasan sampai dengan memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran (Prayudha & Rustam, 2013).

KPI hendaknya lebih ketat melakukan pengawasan terhadap penyiaran di wilayah perbatasan dan segera membenahi permasalahan yang selama ini dikeluhkan pihak pengelola siaran radio di wilayah perbatasan, yaitu masalah SDM yang terbatas, sarana dan prasarana stasiun siaran radio yang kurang lengkap, dan perijinan penggunaan frekuensi untuk radio yang sulit (Darmanto dkk, 2012).

Pemenuhan akses terhadap layanan pendidikan banyak dilakukan dengan berbagai cara dan sarana guna mewujudkan program nawacita pemerintah Presiden Jokowi untuk membangun dari wilayah atau daerah pinggiran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyinergikan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi 1000 sekolah di wilayah terdepan/terluar atau perbatasan melalui kerjasama dengan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Seperti diketahui bahwa salah satu penyebab ketidakmerataan pendidikan di kota besar dengan daerah terdepan, tertinggal, terluar, dan perbatasan atau biasa disebut (Daerah 3TP) adalah minimnya akses

informasi (Oebaidillah, 2016). Kemendikbud juga terus mempercepat terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas melalui berbagai program dan kebijakan yang menjadi sasaran prioritas nasional.

Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan menjadi salah satu kunci mengurangi kesenjangan di masyarakat. Dalam kaitan ini, Mendikbud Muhadjir menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, target di sektor pendidikan bukan sekadar pemerataan akses pendidikan, tapi juga pemerataan pendidikan yang berkualitas (Kemendikbud, 2017). Kebijakan tersebut selaras dengan penyelenggaraan siaran radio pendidikan yang dikelola oleh BPMRPK Kemdikbud sebagai salah satu upaya terobosan untuk mencapai pemerataan pendidikan yang adil dan merata.

Upaya perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui siaran radio diatur di dalam Pasal 36 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang berbunyi "Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya." Lebih jauh diatur bahwa sebuah stasiun radio mempunyai kewajiban untuk menyiarkan konten pendidikan sebesar sekitar 20% dari total program siaran yang dikelola.

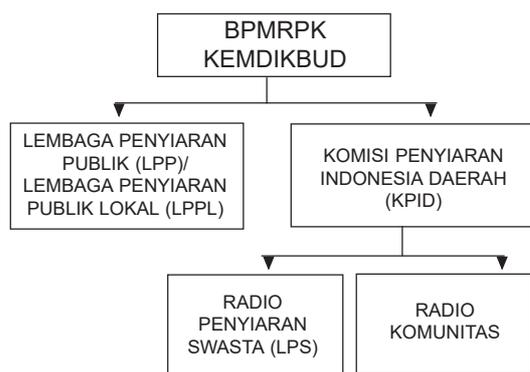
Mengingat fungsi siaran radio sebagai hiburan, kontrol sosial, dan pendidikan maka sudah selayaknya stasiun radio di wilayah perbatasan difungsikan sebagai sarana untuk pemerataan layanan pendidikan oleh pemerintah. Hasil survei LPP RRI di wilayah perbatasan mengungkapkan bahwa untuk program pendidikan proporsinya masih sangat kurang; padahal untuk daerah-daerah perbatasan, program ini sangat dibutuhkan mengingat keterbatasan masyarakat setempat akan akses informasi. Program pendidikan yang sudah disiarkan saja masih sangat perlu peningkatan kualitas, baik dari aspek pilihan substansi maupun format penyajiannya di RRI wilayah perbatasan

Sabang, Atambua, Entikong dan Batam (Darmanto dkk, 2012).

Bertitik tolak dari kondisi penyiaran dan kebutuhan pendidikan di wilayah perbatasan, potensi dan kemanfaatan siaran radio pendidikan serta kemungkinan keterlaksanaan atau penerapannya maka BPMRPK Kemendikbud turut mendukung upaya pemerataan layanan pendidikan melalui siaran pendidikan. Siaran radio pendidikan di Indonesia telah mengudara sejak tahun 2008, bahkan menurut sejarah jauh lebih awal lagi yaitu pada tahun 1950-an yang diselenggarakan Jawatan Pendidikan Masyarakat. Tujuan siaran radio ini adalah untuk melayani para eks tentara pelajar yang terpaksa terhenti pendidikannya karena berperang mempertahankan kemerdekaan RI (Siahaan, 2001).

Kemudian dilanjutkan oleh Pustekkom dan Balai Pengembangan Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) Kemendikbud Yogyakarta selaku unit pengembang media/ audio pembelajaran dan konten siar untuk siaran radio pendidikan. Bentuk siaran yang telah diselenggarakan selama ini yaitu melalui kerjasama kemitraan dengan beberapa stasiun radio, baik radio publik, radio swasta maupun radio komunitas.

Hingga saat ini, ada 67 stasiun radio yang aktif menjadi mitra untuk menyiarkan konten siar pendidikan dari BPMRPK, termasuk radio Smansa-Sebatik, Nunukan yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia. Ke-67 radio mitra BPMRPK ini tersebar di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Sumatera Utara, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (BPMRPK, 2016). Berikut alur model siaran radio pendidikan yang dikembangkan oleh BPMRPK Kemdikbud Yogyakarta (Bagan 1).



Bagan 1. Alur model siaran radio pendidikan yang dikembangkan BPMRPK

Model siaran pendidikan yang dikembangkan oleh BPMRPK Kemdikbud Yogyakarta dengan beberapa stasiun radio adalah dalam bentuk kerjasama kemitraan melalui MoU. Di dalam kerjasama ini, tidak ada unsur biaya (gratis) karena biaya memproduksi konten siaran pendidikan yang diserahkan kepada stasiun radio mitra adalah dibiayai APBN. Namun sesuai dengan MoU, pihak radio mitra mempunyai kewajiban untuk memberikan jadwal siaran, laporan, dan mengirimkan bukti siaran kepada BPMRPK Yogyakarta.

Konten atau program yang disiarkan di beberapa stasiun radio mitra BPMRPK Yogyakarta merupakan hasil rancangan bersama yang dilakukan setiap tahun. Tujuannya adalah agar konten siaran pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan radio mitra dan kearifan lokal di daerah masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian Innayah bahwa Kemitraan BPMRPK Yogyakarta dengan beberapa stasiun radio sejauh ini sudah mulai dirasakan dampaknya terutama di kalangan masyarakat pendidikan (Innayah, 2015).

Dikemukakan Innayah lebih jauh bahwa masyarakat pendidikan menilai konten siaran pendidikan yang disiarkan sejauh ini dinilai baik, bermanfaat, dan penting karena kontennya memang sesuai dengan kebutuhan, penting untuk diketahui, dan sekaligus juga menambah wawasan. Dikemukakan juga bahwa konten siaran pendidikan yang diminati pendengar adalah Ensipop, Kata Mutiara, Dongeng Anak Nusantara, Kisah Tokoh dan Risalah Nabi dan Sahabat. Respon pendengar terhadap

kemenarikan konten siaran pendidikan adalah karena komposisi antara kata/kalimat, musik, *sound effect*, materi dan durasi cukup baik.

Kemitraan dengan stasiun radio juga dijalin oleh Universitas Soedirman (UNSOED) dengan LPP RRI Purwokerto di bidang publikasi informasi, siaran pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan budaya lokal. Masih berkaitan di bidang kemitraan dengan stasiun radio di bidang pendidikan, hasil penelitian Widjanarko, Sulthan, dan Lusiana menunjukkan bahwa mimbar ilmu pengetahuan, teknologi dan sains (IPTEKS) yang merupakan kemitraan antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNSOED dengan LPP RRI UNSOED mencakup 3 (tiga) kategori siaran, yakni aplikasi teknologi untuk pedesaan, peningkatan kualitas kesehatan pedesaan dan sosial humaniora pedesaan (Widjanarko, Sulthan, Lusiana, 2013).

Untuk mendukung kebijakan pemerintah mengenai pendidikan di wilayah perbatasan, maka model siaran pendidikan yang telah dikembangkan BPMRPK Yogyakarta melalui kerjasama kemitraan dapat diperluas untuk membantu konten siaran pendidikan pada berbagai stasiun radio di wilayah perbatasan. Siaran radio pendidikan di wilayah perbatasan merupakan salah satu alternatif dalam rangka perluasan akses terhadap layanan pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berbagai upaya pemerintah di bidang pemerataan kesempatan memperoleh layanan (akses) pendidikan di wilayah perbatasan telah dilakukan melalui pembangunan sarana-prasarana sekolah, asrama, dan pengiriman tenaga pengajar. Memang belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata oleh peserta didik di seluruh wilayah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru dan salah satu di antaranya adalah penyelenggaraan siaran radio pendidikan melalui kerjasama kemitraan antara stasiun radio di wilayah perbatasan dengan BPMRPK Kemendikbud Yogyakarta.

Bentuk kerjasama yang dikembangkan adalah berupa peranserta dalam menyiarkan konten pendidikan yang dikembangkan oleh BPMRPK Kemendikbud Yogyakarta. Stasiun radio yang berperanserta di wilayah perbatasan adalah LPP (RRI), LPPL, LPS, Rakom (Radio Kominitas) bantuan Kominfo dan BBPT yang ada di 12 provinsi di wilayah perbatasan.

Rekomendasi yang dapat dikemukakan sebagai tindak lanjut dari hasil kajian/telaah ini adalah diperlukannya upaya peningkatan, pembinaan, dan perluasan kerjasama kemitraan antara berbagai lembaga terkait di bidang penyelenggaraan siaran radio untuk kepentingan pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Melalui peranserta masing-masing lembaga yang bekerjasama ini diharapkan akan dapat memperlancar pelaksanaan siaran radio pendidikan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- BPMRPK Kemdikbud. 2016. *Laporan Humas Radio Edukasi*. Yogyakarta: BPMRPK.
- Darmanto dkk., 2012. *Pengembangan program dan Program Siaran RRI Perbatasan*. Yogyakarta: Komunikasi UII.
- KPI. 2012. Buku Penyiaran Perbatasan. <https://dokumen.tips/documents/buku-penyiaran-perbatasan-061012.html> (Diakses 24 Juni 2018).
- Prayudha, Harley dan Rustam, Andy. 2013. *Radio is Sound Only, Pengantar dan Prinsip Penyiaran Radio di Era Digital*. Jakarta: Broadcastmagz Publisher.

Jurnal/Prosiding/Disertasi/Tesis/Skripsi

- Hadiyat, Yayat D. 2016. Lembaga Penyiaran Publik sebagai Media Penyiaran Perbatasan: Studi pada Radio Republik Indonesia Stasiun Kupang. **Jurnal Pekommas, Volume 1 No. 1, April 2016, hal. 13-20.**

- Inayah. 2015. Survei Pendengar Terhadap Konten Siar Radio Pendidikan. **Jurnal Teknodik, Volume 19, No. 3, Desember 2015, hal. 283-292.**

- Putra, Hery Kurniawan., Rivaie Wanto., Fatmawati. 2014. *Adaptasi Pembinaan Oleh Pengawas UPT Dinas Pendidikan Dalam Meningkatkan Kompetensi Sosial Guru Sekolah Dasar Di Wilayah Perbatasan*. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jdpdp/article/viewFile/5834/5896> (Diakses 15 Januari 2015).

- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2013. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat-Indonesia-Malaysia (studi evaluatif di Kecamatan Entikong)*. **Widyariset, Vol. 16 No.1, April 2013, hal. 73-80.** <http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/download/28/23>. (Diakses 9 Juni 2016).

- Siahaan, Sudirman. 2006. *Mengapa Harus Menjadi Guru?*. **Jurnal TEKNODIK, Vol. 10 Nomor 19, Desember 2007, hal. 99-121.** <http://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalteknodik/article/view/395/250> (Diakses 23 Agustus 2018).

- Witarsa. 2011. *Pengaruh Kinerja Kepemimpinan Pendidikan Berbasis Nilai Terhadap Pengembangan Budaya Sekolah Di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia (Studi Di SD, SMP, Dan SMK Kabupaten Sanggau)*, **Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 12 No. 1 April 2011, hal. 97-109.**

- [http://jurnal.upi.edu/3897/view/441/pengaruh-kinerja-kepemimpinan-pendidikan-berbasis-nilai-terhadap-pengembangan-budaya-sekolah-di-wilayah-perbatasan-indonesia-malaysia\(studi-di-sd,-smp,-dan-smk-kabupaten-sanggau\).html](http://jurnal.upi.edu/3897/view/441/pengaruh-kinerja-kepemimpinan-pendidikan-berbasis-nilai-terhadap-pengembangan-budaya-sekolah-di-wilayah-perbatasan-indonesia-malaysia(studi-di-sd,-smp,-dan-smk-kabupaten-sanggau).html) (Diakses 5 April 2016).

- Widjanarko, Wisnu Sulthan. Muhammad, Lusiana Yusida. 2013. *Radio Siaran Public sebagai Media Komunikasi Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan*. **Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 1, No.**

2, Desember 2013, hal. 119-124. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/6036> (Diakses 3 Maret 2016).

Yehekel. 2014. *Implementasi Pembangunan Daerah Perbatasan di Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan*. **eJournal Administrasi Negara Volume 4, Nomor 2**, 2014:1377-1390, ISSN: 0000-0000. ejournal.an.fisip-unmul.org. [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/JURNAL%20YEHEKEL%20\(09-18-14-04-25-58\).docx](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/09/JURNAL%20YEHEKEL%20(09-18-14-04-25-58).docx) (Diakses 3 Maret 2016).

Lain-Lain

BPP Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Optimalisasi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah perbatasan*. <http://litbang.kaltimprov.go.id/detailabstraksi-12-optimalisasi-pemerataan-dan-peningkatan-mutu-pendidikan-di-daerah-perbatasan.html> (Diakses 10 Mei 2015).

Batubara, Harmen. 2015. *Wilayah Perbatasan, Buruknya Pengelolaan Perbatasan*. <http://www.wilayahperbatasan.com/wilayah-perbatasan-buruknya-pengelolaan-perbatasan/>(Diakses 24 Juni 2016).

Ginjar. 2014. *Mendikbud: Akses Pendidikan Indonesia Belum Merata*. (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/501232-mendikbud—akses-pendidikan-indonesia-belum-merata>) (Diakses 25 Januari 2015).

Kemenag. 2015. *Penguatan pendidikan Agama di Perbatasan Mendesak*. Sumber Internet:<https://www2.kemenag.go.id/berita/303734/penguatan-pendidikan-agama-di-perbatasan-mendesak?lang=id> (Diakses 24 Juni 2016).

Kompas. 2016. *3.000 Guru Siap Mengajar di Daerah Terpencil*. https://regional.kompas.com/read/2016/01/29/181150711_3.000.Guru.Siap.Mengajar.di.Daerah.Terpencil. (Diakses 11 Juni 2018).

Kemdikbud.2017. *Mendikbud: Target kita bukan sekadar pemerataan akses, tetapi akses yang*

berkualitas. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/08/mendikbud-target-kita-bukan-sekadar-pemerataan-akses-tetapi-akses-yang-berkualitas> (Diakses 16 Juli 2018).

Manurung Krisman. 2011. *Pembangunan Kawasan Perbatasan*. <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/160-oktober-2011/1229-strategi-pembangunan-kawasan-perbatasan.html> (Diakses 14 Januari 2015).

Nielsen. 2014. *Konsumsi Media Lebih Tinggi Di Luar Jawa*. <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html>. (Diakses 8 Juni 2015).

Napitupulu, Ester Lince. 2011. *Perkuat Pendidikan di Perbatasan*. <http://edukasi.kompas.com/read/2011/10/01/04164058/Perkuat.Pendidikan.di.Perbatasan> (Diakses 25 Januari 2015).

Oebaidillah. 2016. *Sinergi TIK Perkuat Pendidikan di Perbatasan*. <http://mediaindonesia.com/read/detail/27979-sinergi-tik-perkuat-pendidikan-di-perbatasan>.

(Diakses 18 Juli 2018).

Ristekdikti. 2016. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf (Diakses 16 Juli 2018)

Siahaan, Sudirman. 2001. *Keberadaan dan Peranan Indonesian Distance Learning Network (IdIn) Serta Tantangannya Dalam Rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia*. (Diakses 23 Agustus 2018). <http://simpen.lppm.ut.ac.bid/ptjj/PTJJ%20Vol%202.2%20september%202001/22sudirman.htm>

Sukoyo, Agus. 2014. *Peran RRI di Wilayah Perbatasan*. <http://www.academia.ed> (Diakses 12 Juni 2016).

UII. 2015. *Pemerintah Dituntut Peduli atas Hak Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat di Wilayah Perbatasan* <http://www.uui.ac.id/>

content/view/3340/257/ (Diakses 12 Januari 2015).

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPMRPK Kemdikbud yang telah memberikan kesempatan sehingga kami bisa melakukan kajian ini. Begitu juga kepada teman-teman yang telah membantu *brainstorming* untuk kajian ilmiah ini.
